

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik*, Phinatama Media, Makassar, 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

-----, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

A.W.Widjaja, *Administrasi Kepegawian*, Rajawali, Jakarta, 2006.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2016.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson Limited, London, 1951.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Gouzali Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005.

- Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.
- J. Enschede, *Beginnelsen Van Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Muhadam Labol, *Modul Etika Pemerintahan, Status Pemerintahan Dalam Negeri*, 2016.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Nunuk Nuswardani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Administrasi*, Scopindo, Surabaya, 2019.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pradnya Parasmita, Jakarta, 2006
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sogeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Sri Hartani dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1999.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Bima Cipta, Bandung, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

**Jurnal:**

- Afifudin Sholeh, Muhammad. "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap" Jurnal Mimbar

Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Volume 4 Nomor 3, 2018

Chandrio Steven, *Disiplin Pegawai Dalam Menciptakan Good Governance Di Kantor Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*, eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 2, 2015.

Fahmi, Wirza. "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2017): 246-265

Hasibuan Ahmad Dahlan, Ferry Aries. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya". *Jurnal Mercatoria* Vol. 6 No. 2, 2013.

Hasim Purba, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional Bidang Pertambangan, Kehutanan, Pertanahan dan, Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum Equality*, Medan, Vol.13.2008.

Jubery Marwan, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten*, Scientium, Volume 3, 2016.

Ridwan, *Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah Suatu Tinjauan Teoretik.*, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* VOL. 7, No.2, November 2013.

Ridwan, *Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Volume 28 Issue 1, Januari 2021

Syam Fauzi, Helmi, dan Fitria, *Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Universitas Jambi*, Volume 3 No. 1, 2019.

#### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

Surat Edaran Menpan No. SE/03/M.PAN/4/2007 tentang Perlakuan Terhadap Pejabat yang Terlibat KKN.

Surat Edaran Mendagri No. 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan PNS Kembali Dalam Jabatan Struktural.

Surat Edaran BKN No. K.26- 30/V.3262/94 tanggal 20 November 2012 Tentang PNS yang dijatuhi hukuman pidana.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

**Tesis:**

Abrar Saputra Zulham, Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Imamul Azis Ahmad. Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Octaria Welly, Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Riau Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019.

Supitri Handayani, *Studi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kota Waringin Barat*. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Jakarta 2013.

**Website:**

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>  
diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 09.28 WITA.

<https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=787>  
diakses pada tanggal 27 Juni 2023, Pukul 15.30 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://www.kbbi.web.id/delik> Akses 17 Juni 2022.

Lihat lebih lanjut dalam “2.357 PNS Korup Dipecat, Ini Data Detailnya diakses dari <https://news.detik.com/berita/4210409/2357-pns-korup-segera-dipecat-ini-data-detailnya> diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 21.09 WITA.

Lihat diskusi PTUN Bandung bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia <https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=787> , diakses pada 27 Juni 2023 pukul 23.10

### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 (tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan frasa “pidana umum” pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 01/K/TUN/2012 tanggal 21 September 2011 dalam perkara Sisminardi dkk melawan Walikota Surabaya.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 9/G/2018/PTUN-BNA tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara Ihsan A. Madjid melawan Bupati Aceh Barat Daya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 25 Juli 2018 dalam perkara Drs. M. Hanafiah AK, S.H melawan Bupati Aceh Barat Daya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 8/G/2019/PTUN.TPI tanggal 30 September 2019 dalam perkara Muhammad Yamin, S.Sos melawan Walikota Tanjungpinang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor; 21/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 6 Mei 2020 dalam perkara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M melawan Bupati Bangli

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 22 september 2020 dalam perkara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M melawan Bupati Bangli